



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 410/366.A/2005

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN DALAM
PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (SPM-LS) DAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) BANTUAN LANGSUNG
MASYARAKAT (BLM)
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) FASE II
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Sukoharjo dan dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas dalam evaluasi kinerja dan teknis pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kabupaten Sukoharjo, maka perlu ditetapkan pejabat yang diberi kewenangan dalam penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 78).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 414.2/678/PMD tanggal 26 April 2005 tentang Penjelasan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PPK II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pejabat yang diberi kewenangan dalam penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :

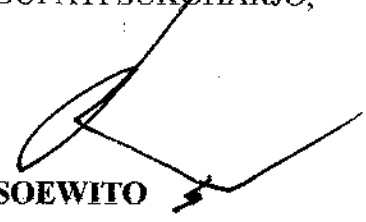
1. Pejabat yang diberi wewenang dalam penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) mempunyai tugas :
 - a. menerima dan menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh PjOK untuk membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
 - b. selaku pengguna anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dimaksud kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ditunjuk sesuai dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Selanjutnya KPPN akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan memindahbukukan (transfer) dana ke rekening kolektif desa atau rekening Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (BPPK) pada Bank Pemerintah setempat sesuai dengan SPM-LS yang diajukan.
2. Pejabat yang diberi wewenang dalam menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) mempunyai tugas :
 - a. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas dasar permintaan pencairan dana dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK);
 - b. bersama Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK), membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan diketahui oleh Camat bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 410/366.A/2005
Tanggal : 22 Agustus 2005

**SUSUNAN PEJABAT YANG BERWENANG DALAM PENERBITAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (SPM-LS) DAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN (SPP) BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PROGRAM PPK	KEWENANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Kecamatan Nguter	Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM	Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
2	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Nguter	Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK)	Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
3	Sekretaris Kecamatan Mojolaban	Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM	Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Mojolaban	Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK)	Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
5	Sekretaris Kecamatan Polokarto	Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM	Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Polokarto	Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK)	Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
7	Sekretaris Kecamatan Baki	Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM	Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
8	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Baki	Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK)	Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO